



Bayar PBB Kini Bisa Pakai Qris

- Pontianak Jadi Pelopor di Kalimantan
- Pemkot Kurangi Risiko Human Error



Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Edi R Kamtono
Wali Kota Pontianak

PONTIANAK, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meluncurkan terobosan baru dalam pelayanan publik. Kini, masyarakat Kota Pontianak dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara instan hanya dengan memindai kode QR (QRIS Dinamis) melalui ponsel pintar mereka.

Peluncuran inovasi ini ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, bersama Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar dan jajaran lintas sektoral lainnya. Acara yang digelar di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani pada Minggu (10/8) ini

membuka era baru kemudahan pembayaran pajak cepat, mudah, dan tanpa antri di Kalimantan.

"Program ini bekerja sama dengan Bank Kalbar serta didukung Bank Indonesia, BPK, dan BPKP, guna mempermudah masyarakat bertransaksi digital melalui aplikasi e-Ponti," tutur Wako Edi usai peresmian.

Edi memaparkan, awal Agustus, realisasi pembayaran PBB-P2 telah men-

■ Bersambung ke hal. 7



CARA BAYAR PBB GUNAKAN QRIS

- Klik https://eponti.pontianak.go.id/index.php/pembayaran_va
 - Masukkan NOP PBB lalu klik ikon "cari"
 - Setelah NOP PBB diisi dengan benar, akan tampil semua data mulai dari NOP PBB sampai Pajak Terutang
 - Klik pembayaran
 - Pilih Qris untuk pembayaran
- Manfaat**
- Kemudahan: Proses pembayaran menjadi lebih cepat dan mudah karena tidak perlu mengantri di bank atau kantor pajak.
 - Efisiensi: Transaksi dapat diselesaikan dalam hitungan detik.
 - Aksesibilitas: Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet.
 - Keamanan: Pembayaran terintegrasi dengan riwayat transaksi yang tersimpan di aplikasi pembayaran.
 - Mendukung Elektronifikasi Transaksi: Membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan transaksi non-tunai.

SUMBER: BAPENDA KOTA PONTIANAK



capai 34 persen. Ia mengakui masih ada masyarakat yang menunda pembayaran karena kurangnya informasi, sehingga Pemkot akan melakukan pendataan, penilaian, dan memberikan insentif bagi wajib pajak tertentu.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," sebutnya.

Kepala Bapenda Kota Pontianak, Ruli Sudira menjelaskan, QRIS Dinamis bekerja dengan mengintegrasikan data wajib pajak ke dalam sistem pembayaran digital.

"Masyarakat cukup mengakses portal atau aplikasi PBB online, memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP), dan sistem otomatis menampilkan rincian tagihan beserta kode QR unik untuk pembayaran," terangnya.

Kode QR tersebut dapat dipindai menggunakan berbagai aplikasi pembayaran digital yang mendukung QRIS, seperti mobile banking atau dompet digital. Dengan sistem ini, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak atau bank,

sehingga lebih praktis dan dapat dilakukan kapan saja.

Menurut Ruli, penerapan QRIS Dinamis memiliki sejumlah keuntungan, antara lain kecepatan dan kemudahan pembayaran, data tagihan yang akurat, pencatatan transaksi otomatis, serta mendukung digitalisasi layanan publik. "Nominal tagihan sudah terisi otomatis, sehingga mengurangi risiko kesalahan input dan human error," jelasnya.

Ia menambahkan, penerapan QRIS Dinamis di Pontianak merupakan bagian dari upaya pemerintah kota untuk meningkatkan transparansi, modernisasi layanan, dan memperluas akses masyarakat terhadap kemudahan pembayaran pajak.

QRIS Dinamis untuk PBB sebelumnya telah diimplementasikan di beberapa daerah seperti Banda Aceh, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan Kabupaten Polewali Mandar. Namun, Pontianak menjadi pelopor di Kalimantan dalam memanfaatkan teknologi ini.

"Dengan adanya QRIS Dinamis, kami berharap masyarakat lebih cepat, mudah, dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya," sebut Ruli.

Bank Lain

Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah Bank Kalbar, Yuse Chaidi Amzar, mengatakan inovasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan dan memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak.

"Dengan QRIS dinamis, masyarakat bisa membayar PBB melalui bank lain, e-wallet, maupun e-commerce. Harapannya, realisasi pembayaran PBB yang saat ini baru 35 persen bisa meningkat hingga akhir tahun," ungkapnya.

Yuse menjelaskan, kemudahan QRIS dinamis terletak pada sistem yang otomatis menampilkan data wajib pajak setelah memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP). Masyarakat cukup memindai kode QR untuk melakukan pembayaran, dan sistem akan langsung menampilkan bukti bayar yang bisa disimpan.

Sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Kalbar juga tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang bertugas menyiapkan sarana dan prasarana pembayaran pajak bagi pemerintah daerah. Selain QRIS dinamis, Bank Kalbar turut

menyediakan alat rekam pajak atau tapping box untuk memonitor pajak restoran dan hiburan.

"Kami mengajak warga Pontianak dan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya untuk taat membayar pajak. Pajak yang kita bayarkan akan kembali dalam bentuk pembangunan yang bermanfaat untuk kita semua," tutup Yuse.

ASN Antusias

Demi meningkatkan kesadaran dan kemudahan pelayanan pajak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak bekerja sama dengan Bapenda Provinsi Kalbar, menggelar Jemput Pajak PBB-P2 dan Pajak Kendaraan Bermotor bagi para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Kamis kemarin.

Dua mobil pelayanan keliling disiapkan di halaman parkir Kantor Wali Kota Pontianak untuk melayani para ASN yang ingin membayar pajak PBB-P2 maupun kendaraan bermotor. Pelayanan ini digelar mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Wajib pajak juga mendapatkan souvenir berupa mug.

Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah, menerangkan kegiatan pemba-



garan pajak secara langsung atau on the spot ini merupakan bentuk sinergi antar instansi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

"Hari ini saya memonitor kegiatan pembayaran pajak di lapangan. Ini adalah bentuk kolaborasi dalam peningkatan pendapatan daerah melalui input pajak langsung di lokasi-lokasi yang dinilai potensial, seperti kawasan perkantoran pemerintah," ujarnya saat meninjau kegiatan jemput pajak di halaman Kantor Wali Kota.

Amirullah berharap, metode jemput bola ini dapat mempercepat realisasi penerimaan pajak daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dan jajaran terkait yang telah memfasilitasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan bersama tersebut.

Terkait tingkat kepatuhan ASN, Sekda menilai sejauh ini sudah cukup baik. Ia menegaskan, ASN selanjutnya menjadi contoh dalam ketaatan membayar pajak kepada masyarakat.

"Sebagai aparatur pemerintah, kita wajib menunjukkan keteladanan dalam menaati aturan, termasuk dalam hal membayar pajak,"

katanya.

Amirullah juga mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan.

"Contohnya PBB yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pontianak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kota," terangnya.

Terkait perluasan program jemput pajak, pihaknya masih akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Namun, dalam rencana ke depan, pelayanan ini akan diperluas ke seluruh kecamatan serta menysar titik-titik potensial lainnya dengan metode jemput langsung di lokasi.

Kepala Bapenda Kota Pontianak Ruli Sudira menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi jemput bola untuk memudahkan para ASN dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa harus datang ke kantor pelayanan pajak.

"Melalui layanan langsung ini, kami ingin memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kesadaran ASN untuk taat pajak sebagai bagian dari kontribusi membangun Kota Pontianak," ujarnya.

Menurutnya, layanan jemput pajak, yang kini sudah dilaksanakan di enam

kecamatan termasuk yang digelar saat ini di halaman Kantor Wali Kota, akan terus diperluas ke seluruh kelurahan di Kota Pontianak. Ruli bilang, program jemput pajak merupakan bagian dari kolaborasi antara Bapenda Kota Pontianak dan Bapenda Provinsi Kalimantan Barat.

"Ini merupakan bentuk pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Harapannya, di sela-sela aktivitas mereka, wajib pajak bisa tetap melaksanakan kewajiban membayar pajak," ujarnya.

Dalam layanan jemput pajak ini, Bapenda menyediakan fasilitas untuk pembayaran dua jenis pajak, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sejak dilaksanakan di enam kecamatan, Ruli menyebut antusiasme masyarakat dan ASN cukup tinggi.

"Antusias warga sangat baik. Ini membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat memiliki niat dan kepatuhan untuk membayar pajak, hanya perlu didorong dengan kemudahan akses dan

sosialisasi," tambahnya.

Realisasi Pendapatan

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, sebelumnya telah menyampaikan capaian positif realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak hingga pertengahan tahun 2025. Dari total target sebesar Rp818 miliar, realisasi pendapatan daerah sudah tembus 41,7 persen.

"Alhamdulillah, untuk pajak daerah bahkan sudah melampaui target. Namun retribusi masih belum mencapai sasaran," ujar Edi usai memimpin rapat evaluasi PAD Triwulan II di Ruang Pontive Center, belum lama ini.

Edi menyebut, dalam rapat evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kota Pontianak masuk kategori zona hijau nasional, tanda pengelolaan pendapatan dinilai cukup baik.

Namun begitu, dia menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan dari sektor-sektor strategis tetap harus dikejar. Sektor seperti parkir, restoran, dan pajak hiburan, dinilai masih punya potensi besar yang belum tergarap maksimal. Untuk itu, Pemkot Pontianak kini sedang memetakan potensi pajak berbasis fungsi lahan dan aktivitas bangunan di lapangan. (ayu)